PEMERINTAH DAERAH POVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

RENCANA KERJA

RENJA TAHUN 2023



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
Jl. KH. Syech Nawawi Al Bantani
Pallima Serang Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (Kp3b)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima-Serang Telp. (0254) 267090

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN

NOMOR : / -Satpol PP/2022

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023, perlu disusun secara optimal sehingga dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;

b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan dokumen tersebut pada poin "a" diatas perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor. 182 Tahun 2000 tambahan Lembaran Negara Nomor. 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara No.47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara No. 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);

10 . Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 4).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023, sebagaimana terlampir

KEDUA : Tugas Tim Teknis adalah :

a. Menyiapkan dan Mengkompilasi Data dari seluruh Bidang di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten;
b. Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten;
c. Menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satpol PP Provinsi Banten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023 bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP Provinsi Banten.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Serang
Pada tanggal : 24 Mei 2022

KASATPOL PP,

AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.
NIP. 197108051991011001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Pj. Gubernur Banten, sebagai laporan.
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, sebagai laporan.
3. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Banten, sebagai laporan.

Lampiran : Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Banten
Nomor : 903 / 99 - SatpolPP/2022
Tanggal : 24 Mei 2022
Tentang : **Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023.**

TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) SATPOL PP PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

Penggungjawab	:	Kepala Satpol PP Provinsi Banten
Ketua	:	Sekretaris Satpol PP Provinsi Banten
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian PEP Satpol PP Provinsi Banten
Anggota	:	1. Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan 2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas 4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 6. Kepala Sub Bagian Keuangan.

KASATPOL PP,

AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.
NIP. 19710805 199101 1001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023 dapat diselesaikan, Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya, Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yag telah berpasrtisipasi dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan Penanganan Bencana Kebakaran di Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Serang, Juni 2022

Kasatpol PP Provinsi Banten

ADUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.

NIP. 19710805 199101 1001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renctra Perangka Daerah	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	35
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	38
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	56
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	59
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	71
BAB V	PENUTUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pagu Anggaran dan Realisasi Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2021 12
Tabel 2.2. Pagu Anggaran dan Realisasi Satpol PP Provinsi Banten Sampai Dengan Semester I Tahun 2022 13
Tabel 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Satpol PP Provinsi Banten 15
Tabel 2.4. Pencapaian IKU Satpol PP Provinsi Banten 27
Tabel 2.5 Pencapaian Pelayanan Kinerja Sapol PP Provinsi Banten . 29
Tabel 2.6. Penetapan Permasalahan Satpol PP Provinsi Banten 37
Tabel 2.7. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 40
Tabel 2.8. Usulan Program dan Kegiatan da Pemangku Kepentingan Tahun 2023 51
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026 58
Tabel 3.2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023 61
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 75

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Hal tersebut disusun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara berkaitan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Renja OPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Sesuai amanat tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023. Renja Satpol PP Provinsi Banten merupakan dokumen rencana pembangunan Perangat Daerah berjangka waktu 1 (satu) tahun guna menggoperasionalisasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satpol PP Provinsi Banten, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diamanatkan dalam peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 memuat hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan rencana kerja serta pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif. Substansi dalam Rencana Kerja ini adalah mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, RKPD Pemerintah Provinsi Banten dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2023-2026. Penyusunan rencana kerja ini juga sejalan dengan salah satu langkah awal dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu penyusunan Rencana Kerja OPD.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten telah melaksanakan forum SKPD yang dihadiri dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja kab/kota se-Provinsi Banten, Unsur masyarakat dan akademisi untuk dijadikan rekomendasi dalam menyusun program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada Tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan kedalam dokumen Renja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023.

Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Banten untuk tahun mendatang, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya harus mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok Satpol PP Provinsi Banten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025,
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lemberan Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas [Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022] (Lemberan Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lemberan Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisesi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 41 tahun 2002 tentang Penguruasan Hutan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembiangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten
33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, aruhan dan acuan dalam menentukan skala prioritas program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun anggaran 2023. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan disertai pagu indikatif

pada Tahun 2023;

2. Merumuskan program kerja Satpol PP Provinsi Banten dan kerangka pendanaan pada Tahun 2023;

Adapun tujuan Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023
2. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas dan indikasi kegiatan Satpol PP Provinsi Banten pada Tahun 2023;
3. Menjadi acuan dalam perumusan program kerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Satpol PP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
5. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Banten.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan RKPD, serta Pemahaman Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

Bab ini menyajikan tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan OPD

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan Kaidah Pelaksanaan atau dokumen Rencana Kerja, Catatan Penting dari Rencana Tindak Lanjut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satpol PP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Banten. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut Renja Satpol PP Provinsi Banten pada Tahun 2021 secara keseluruhan pelaksanaan Renja mencapai 93,30%. Hal ini menunjukan bahwa pencapaian kinerja program dan kegiatan berjalan optimal dengan tingkat deviasi sebesar 6,70%. Sedangkan pelaksanaan Renja pada Tahun 2022 sampai dengan Semester I sebesar 50,46 % dan kemungkinan masih dapat meningkatkan lagi karena waktu yang tersedia cukup lama dan penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa relative masih besar, sehingga sangat optimis pada akhir tahun 2022 diharapkan keberhasilan pencapaian kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2021 baik secara realisasi keuangan maupun fisik.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD . Renja Satpol PP Provinsi Banten pada dasarnya memuat pengukuran hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakanoleh Satpol PP Provinsi Banten selama tahun 2021 dan perkiraan target 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja menjadi sangat penting mengingat fungsinya sebagai penguktur keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indicator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, lapora, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2021

Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2021, telah selaras dengan target didalam Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun 2021 sebesar **Rp. 37.187.822.944,-** (Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 32.902.909.494,-atau 88,48% dari pagu
b. Belanja untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 3.541.808.650,- atau 9,52% dari pagu
c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 743.104.800,- atau 2,00% dari pagu

Realisasi anggaran program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Banten pada tahun 2021 sebesar **Rp. 34.697.892.104**,-(Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Rupiah) dengan pencapaian rasio 93,30%. Terdiri dari :

a. Realisasi belanja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 30.649.923.204,- dengan rasio 82,42% dari pagu total atau 93,15% dari pagu anggaran program
b. Realisasi belanja untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 3,355.639.900 dengan rasio 9,02% dari pagu total atau 94,74% dari pagu anggaran program
c. Realisasi belanja untuk Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 692.329.000 dengan rasio 1,86% dari pagu total atau 93,17 % dari pagu anggaran program

Pencapaian kinerja Satpol PP tahun 2022 dari 3 Pregram dan 12 kegiatan realisasinya sesuai rencana kerja. Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja dalam mencapai target kegiatan diantaranya kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan dan adanya dorongan dari Kepala Satuan kepada masing-masing PPTK untuk melaksanakan percepatan terhadap pelaksanaan kegiatannya.

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk akhir Desember tahun 2021, capaian kinerja sebesar 93,30 % untuk keuangan dan 100% untuk fisik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya pada akhir Desember Tahun 2021. Secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1. Pagu Anggaran dan Realisasi Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2021

No.	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
		Rp.	Rp.	%	%
1	2	3	4	5	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	37.187.822.914,00	34.037.892.304,00	93,30	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.900.909.494,00	30.649.923.204,00	99,15	100,00
1	Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.466.000,00	165.109.500,00	78,83	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.085.873.314,00	18.152.648.038,00	90,38	100,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.037.700.000,00	946.967.097,00	31,35	100,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.904.477.180,00	8.859.198.474,00	99,49	100,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.458.580.000,00	1.467.655.000,00	97,51	100,00
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.175.728.350,00	1.027.322.373,00	89,32	100,00
II	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	3.541.808.650,00	3.355.639.900,00	94,74	100,00
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.466.535.650,00	2.466.547.900,00	99,00	100,00
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	929.793.000,00	813.983.000,00	87,59	100,00
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	145.480.000,00	83.009.000,00	95,87	100,00
III	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	743.104.801,00	692.329.000,00	93,17	100,00
1	Penyelenggaraan Pemeliharaan Rawan Bencana Kebakaran	479.424.800,00	440.459.000,00	91,87	100,00

3	Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Ketertiban dan Penyelenggaraan Non Penegakan	293.680.000,00	251.870.000,00	85,77	100,00
	JUMLAH	17.287.822.944,00	34.037.892.304,00	99,20	

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2022, pagu anggaran Satpol PP Provinsi Banten sebesar Rp. 35.537.925.000,- terurai dalam 3 program dan 12 kegiatan serta 44 Subkegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 17,933,249,012,- dengan capaian kinerja keuangan per Triwulan II sebesar 50,46 %.Dengan capaian kinerja sebesar 50,46 % tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dapat dikategorikan sebagai OPD yang berhasil/memuaskan dalam pencapaian kinerjanya pada Triwulan II/Semester I. Secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2. Pagu Anggaran dan Realisasi Satpol PP Provinsi Banten Sampai Dengan Semester I Tahun 2022

No.	Nama Kegiatan/Tolak Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan (Rp.)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	35.537.925.000,00	17.933.249.012,00	50,46	51,84
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.339.475.000,00	16.672.165.767,00	53,21	66,46
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.466.000,00	74.338.500,00	48,12	47,72
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.774.051.500,00	10.068.188.579,00	60,03	60,57
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.258.000,00	18.109.000,00	52,86	55,26
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.151.038.000,00	411.332.593,00	35,73	37,04
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.948.082.000,00	5.341.599.640,00	48,79	51,11
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.531.672.500,00	525.819.500,00	34,32	34,39

7	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	640.927.000,00	613.000.000,00	1,81	1,81
II	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.350.000.000,00**	**1.036.637.255,00**	**30,94**	**30,95**
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.325.000.000,00	825.725.000,00	39,05	39,72
2	Penegakan Perdalam Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.000.000.000,00	204.142.230,00	20,41	20,51
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	775.000.000,00	7.366.000,00	1,73	1,67
III	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**548.450.000,00**	**234.446.000,00**	**73,66**	**73,55**
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana kebakaran	673.150.000,00	182.850.000,00	28,04	34,07
2	Pembinaan dan Pengawasan Penanggulangan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	275.000.000,00	51.596.000,00	11,45	13,99
	JUMLAH	**35.537.525.000,00**	**17.993.289.012,00**	**50,46**	**50,46**

Adapun Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Satpol PP Provinsi Banten

Kode	Urusan Wajib, Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra (Capaian Program (Outcome) Pada Akhir Tahun Renstra) 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Lalu (Capaian Program (Outcome) dan Keluaran Kegiatan (Output) yang Berhasil Dicapai) 2021	Target dan Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun ini)			Target Program dan Kegiatan (Output) Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Kondisi Kinerja (Capaian/Output) Renstra yang Belum Tercapai di akhir tahun lalu (2018)	
					Target Hasil Program/ Keluaran Kegiatan tahun 2022	Realisasi Hasil Program/ Keluaran Kegiatan tahun 2021	Capaian Realisasi (%)		Kondisi Capaian Program dan Kegiatan (Outcome / Output) Renstra tahun 2018	Target Capaian Kondisi Akhir Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program, Outcome/Output Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 (Lokasi)	Analisis Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun (N) s.d. (2019)			Target Program dan Kegiatan / Kinerja Pelayanan Jasmas tahun 2023	Prediksi Realisasi Capaian Program dan Kerangka Pendanaan tahun terakhir (2022)	
					Target Kinerja Program / Capaian (akhir 2022)	Realisasi Kinerja Program / Capaian (akhir 2022)	Capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Akhir Tahun 2022	Target Capaian Program / Kegiatan Terakhir (%)
		Pemerintah Daerah Provinsi Banten								
		Persentase Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
	Pemerintah Daerah dan Wakil Daerah	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	80	80	0	80	100	80	80	100
		Persentase Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
		Persentase Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
		Persentase Kinerja Pemerintah Daerah	80	80	80	80	100	80	80	100
		Persentase Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
	Perangkat Daerah Provinsi Banten	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang baik	1	1	1	1	100	1	1	100
		Persentase Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
	Pemerintah Daerah dan Wakil Daerah	Persentase Kinerja Pemerintah Daerah	80	80	80	80	100	80	80	100
		Persentase Kinerja Pemerintah Daerah	80	80	80	80	100	80	80	100
		Persentase Kinerja Pemerintah Daerah	80	80	80	80	100	80	80	100
	Pemerintah Daerah dan Wakil Daerah	Persentase Kinerja Pemerintah Daerah	80	80	80	80	100	80	80	100

Kode	Urusan Wajib/ Pilihan/ Penunjang/ Unsur/ Sub Unsur/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Outcome) Tahun 2023 (Akhir)	Realisasi Target Kinerja dan Capaian Anggaran sampai dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Anggaran Tahun (N-1) s.d (2019)			Target Program dan Kegiatan / Kinerja Pemerintah daerah tahun 2023	Prediksi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai akhir tahun berjalan (2022)	
					Target Kinerja Anggaran (awal) tahun (N-1)	Realisasi Kinerja Anggaran (awal) tahun (N-1)	Capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d akhir tahun berjalan (2022)	Target Capaian Program Kegiatan (%)
	Penanganan									

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan Wajib/ Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 (Akhir)	Realisasi Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun (N-1 s.d. (2019)			Target Program dan Kegiatan / Renja Perangkat daerah tahun 2023	Prediksi Realisasi Capaian Program dan Kerangka Pendanaan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah (akhir 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (akhir 2022)	Capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kerangka Pendanaan (2023)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan (%)
	Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisa	Terselenggaranya Data/Pelaksanaan Analisa	12	11	12	12	100	12	12	100
		Terselenggaranya Pengumpulan Data Potensi Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
		Terselenggaranya Pengolahan Data Potensi Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
		Terselenggaranya Analisa Data Potensi Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
		Terselenggaranya Penyusunan Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
		Terselenggaranya Pengumpulan Data Potensi Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tertentu Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Tertentu Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6	6	6	6	100	6	6	100
		Terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1	1	1	1	100	1	1	100
		Terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1	1	1	1	100	1	1	100
		Terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1	1	1	1	100	1	1	100
		Terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1	1	1	1	100	1	1	100
		Terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1	1	1	1	100	1	1	100
	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	6	6	6	100	6	6	100
		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	1	1	100	1	1	100
		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	1	1	100	1	1	100
		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	1	1	100	1	1	100
		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	1	1	100	1	1	100
		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	1	1	100	1	1	100
	Program Pemberdayaan Hak Kependudukan	Cakupan pelayanan terselenggara pemberdayaan penduduk	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Nama Unit Organisasi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kerangka Regulasi Tahun 2023 (Akhir)	Analisis Target Kinerja dan Capaian Anggaran 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Regulasi Tahun (N-1 s.d. (2019)			Target Program dan Kegiatan / Kinerja Pemerintah daerah tahun 2023	Prediksi Realisasi Capaian Program dan Kerangka Regulasi (N-1)	
					Target Kinerja Program dan Kerangka Regulasi (awal) (2019)	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Regulasi (akhir) (N-1)	Capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kerangka Regulasi (2022)	Target Capaian Program dan Kerangka Regulasi (N)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Nama Sub Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 (Awal)	Analisis Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023	Prakiraan Maju Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun (N+1) s.d (N+3)			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Prakiraan Maju Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (N+4)	
					Target Kinerja Program Tahun 2024	Kerangka Pendanaan Tahun 2024	Capaian Tahun N+3		Kerangka Pendanaan Tahun 2026	Target Capaian Tahun 2026
	Pemerintah Provinsi Banten									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kerangka Regulasi Tahun 2023 (Akhir)	Kondisi Target Kinerja dan Kerangka Regulasi pada Awal Perencanaan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Regulasi Tahun (%) s.d. (2019)			Target Program dan Kerangka Regulasi Setelah Penyesuaian (jika ada) 2023	Prediksi Realisasi Capaian Program dan Kerangka Regulasi pada akhir tahun perencanaan (2023)	
					Target Kinerja Program dan Kerangka Regulasi (awal tahun 2023)	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Regulasi (awal tahun 2023)	Capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kerangka Regulasi (%)	Target Capaian Setelah Penyesuaian (%)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Nama Unit Organisasi dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 (Awal)	Analisis Target Kinerja dan Capaian Kegiatan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-1) s.d. (2019)			Target Program dan Kegiatan / Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2023	Prediksi Realisasi Capaian Program dan Kerangka Pendanaan Akhir tahun perencanaan (2026)	
					Target Kinerja Program / Kegiatan (awal) (2018)	Realisasi Kinerja Program / Kegiatan (awal) (2019)	Capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (2026)	Target Capaian Program / Kegiatan Terakhir (%)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Nama Unit Organisasi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun (N-1) s.d. (2019)			Target Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Awal) dan Akhir Tahun 2023	Prediksi Realisasi Capaian Program dan Kerangka Pendanaan pada akhir tahun perencanaan (2023)	
					Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Awal) (2018)	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Awal) (2)	Capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kerangka Pendanaan (2023)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan (%)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 (Akhir)	Kondisi Target Kinerja Hasil Program dan Cakupan Kegiatan pada akhir periode RPJMD 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 s.d 2022 (RKA)			Target Program dan Kegiatan / Kinerja Pendanaan tahun 2023	Prediksi Realisasi Capaian Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2023 (RKA)	
					Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2022	Capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2023	Target Capaian Realisasi Capaian Kinerja (%)

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan Pergub No. 83 Tahun 2016 pasal 56 ayat 2, Satpol PP Provinsi Banten dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 57 ayat 1 menyebutkan tugas pokok Satpol PP adalah membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub bidang kebakaran, serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Selanjutnya Pasal 57 ayat 2 menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur;
c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi;
d. Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara geografis Provinsi Banten memiliki luas wilayah 9.662,92 KM². Secara demografi sampai dengan tahun 2021 Provinsi Banten memiliki penduduk bertempat tinggal tetap sebanyak 12.061.475 juta jiwa (BPS, Banten), jumlah penduduk tersebut belum termasuk

penduduk yang tinggal tidak tetap yang telah berbaur di tengah-tengah masyarakat. Komposisi penduduk tersebut terdiri dari keberagaman suku, agama, ras dan golongan (SARA).

Secara suku sebagian besar Provinsi Banten dihuni oleh suku Sunda Banten kemudian disusul Jawa, sebagian dari suku di pulau Sumatera. Secara agama penduduk Provinsi Banten sebagian besar beragama Islam kemudian secara berurutan Katholik, Kristen, Budha, dan Hindu. Keberagaman geografi dan demografi yang dimiliki Provinsi Banten berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan golongan (SARA) serta kondisi geografis yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu perlu dikelola sedemikian rupa sehingga tercipta stabilitas wilayah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis dan semakin kompleks dibutuhkan pengawasan intensif dari pemerintah.

Penyelenggaraan Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sangat berperan dalam mempengaruhi perilaku dan karakteristik bangsa agar arah berkembang sesuai dengan arah dan tujuan negara dan mampu menjawab permasalahan masyarakat. Perkembangan ekonomi mikro di Provinsi Banten relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati Kebijakan /regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Kondisi tersebut diatas sangat memungkinkan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban, terjadinya pelanggaran Perda serta unjuk rasa yang merupakan tugas Satpol PP dalam penanganannya. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok

untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Banten, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas. disamping itu, fungsi perlindungan masyarakat saat ini juga menjadi bagian dari tugas Satpol PP dalam penyelenggaraannya. Pemberdayaan Satlinmas merupakan ujung tombak pelaksanaan perlindungan masyarakat, pengamanan, serta terciptanya ketentraman dan ketertiban dan penanganan bencana di Provinsi Banten.

Tolok ukur kinerja Satpol PP sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP memilikberatkan pada penegakan produk-produk hukum serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mematuhi peraturan dan upaya peningkatan ketyamanan dan keamanan lingkungan. Hal itu berusaha diwujudkan dengan upaya (meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar atau tugas pokok fungsi (tupoksi) secara efektif dan efisiensi dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang baik (good governance).

Kinerja Pelayanan Satpol PP diukur dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Program) yang merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Penetapan indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan

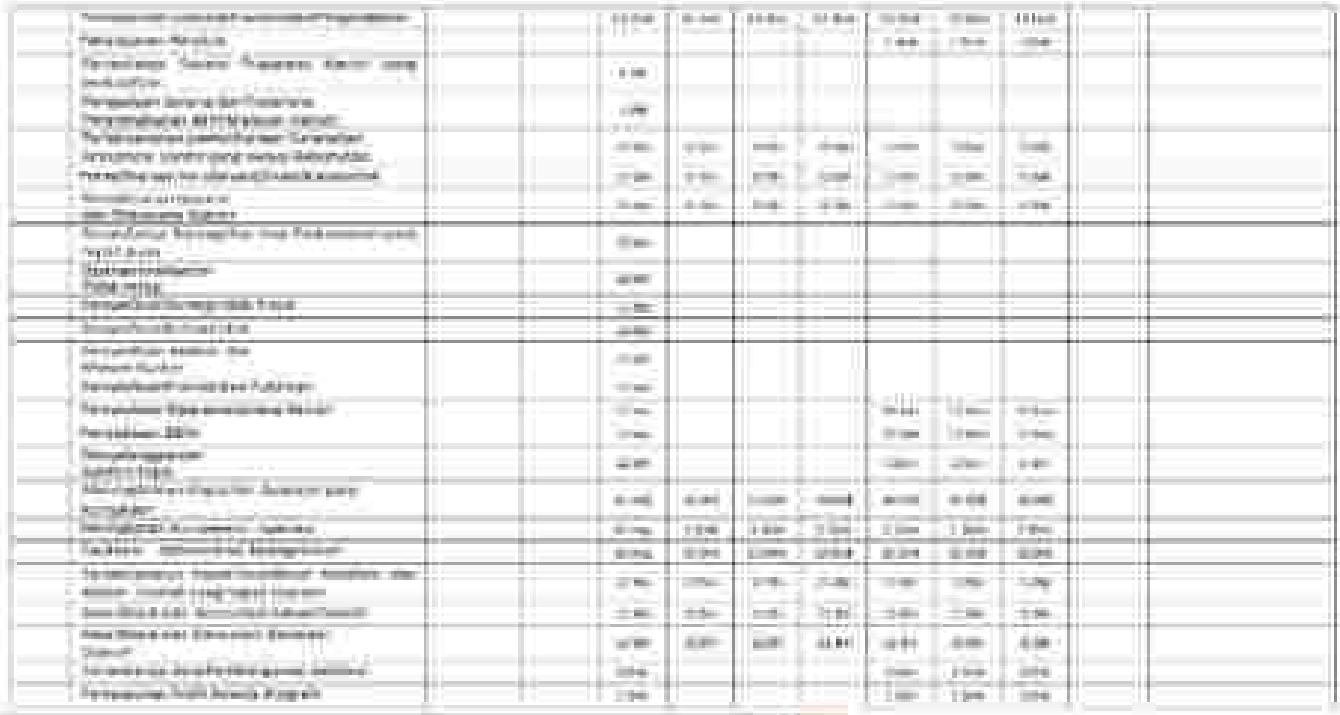
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	80 nilai	80 nilai	Penilaian SAKIP
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah yang Aman dan Kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundangan Undangan Daerah	80 %	80%	ΣCakupan Pelayanan trabtibumlinmas, penegakkan perdan dan Koordinasi Kebakaran dibagi jumlah Perda dikali 100

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi Banten termasuk kategori berhasil karena mencapai nilai 80 baik untuk capaian SAKIP maupun Rasio Penegakkan Perda.

Capaian Pelayanan Kinerja Satpol PP yang diukur dari indikator kinerja utama program dan kegiatan pada dapat dilihat pada tabel berikut ini:

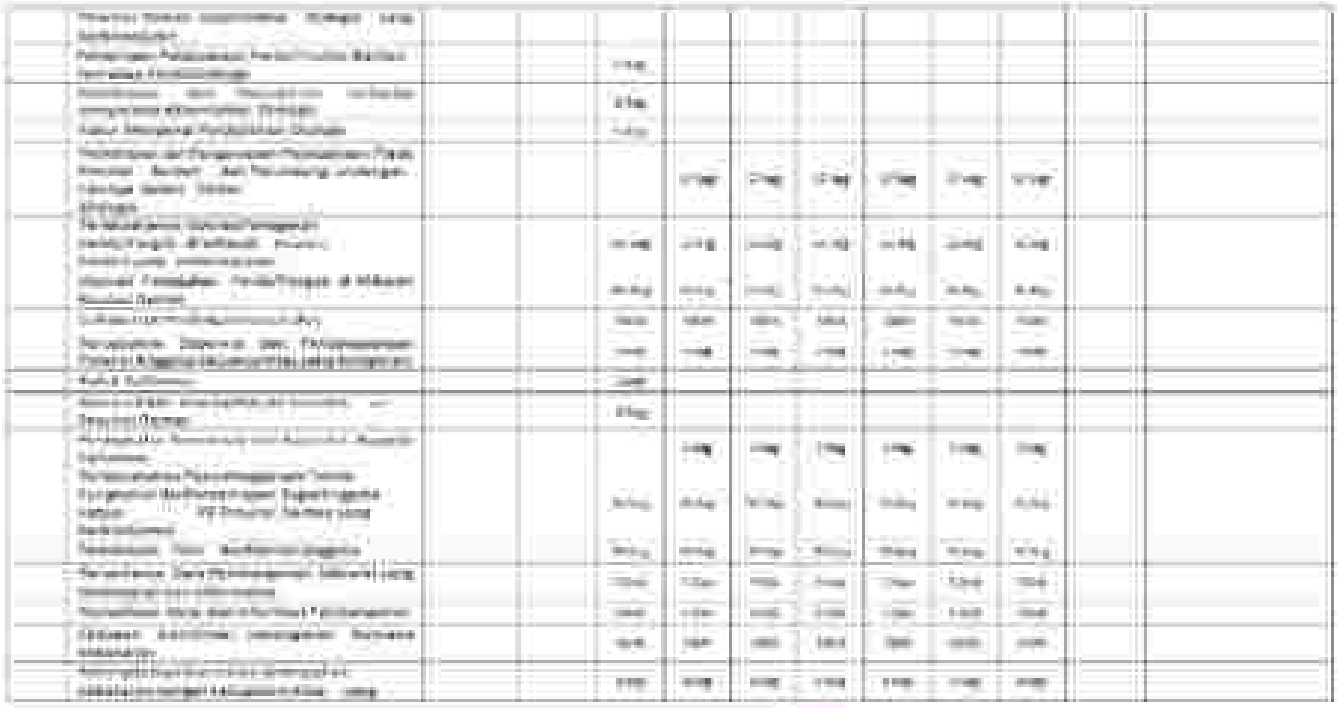
Tabel 2.5 Pencapaian Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

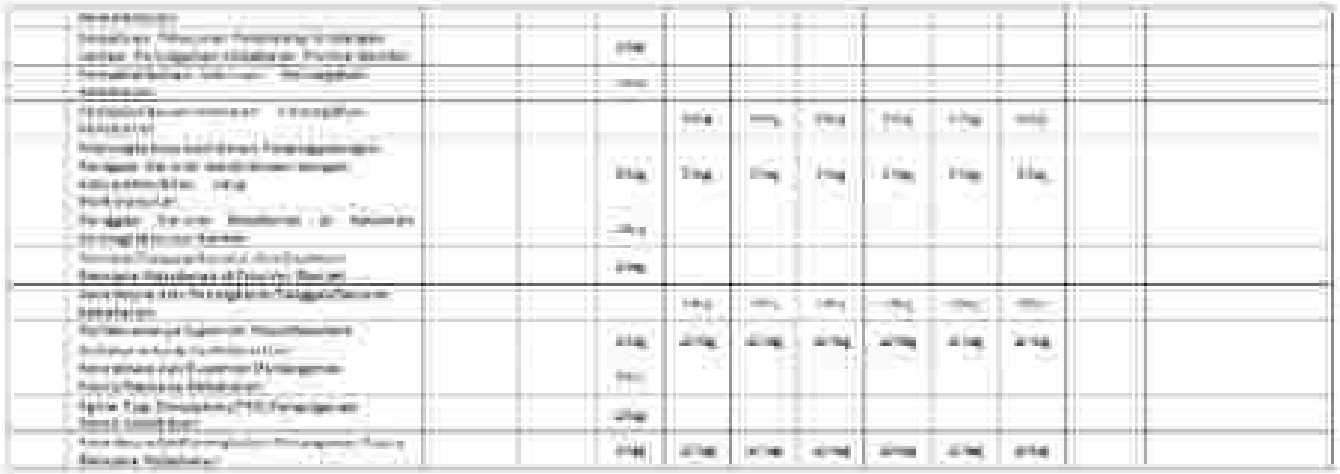
No.	Indikator	Target RPJMD	Target RENSTRA	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Prosentase		Capaian Kondisi
				2017	2018	2019	2020	2018	2019	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	[illegible]							[illegible]				
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		





RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022





2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, namun dengan masih adanya berbagai keterbatasan, maka capaian penyelenggaraan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih belum optimal.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Provinsi Banten tahun tahun terakhir menunjukan intensitas yang semakin meningkat, hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang jika dikelola dengan baik. Tantangan yang masih dihadapi Satpol PP Provinsi Banten dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
2. Belum maksimalnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
3. Belum Optimalnya Kerjasama dan Koordinasi dengan Aparat/Instansi Terkait dalam Penelitian dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Maraknya Demonstrasi/Unjuk Rasa dan Kerusuhan Sosial;

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat. Isu Strategis harus menjadi perhatian serius Satpol PP Provinsi Banten yang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Berikut ini aspek strategis organisasi serta isu strategis yang sedang dihadapi, yaitu:

1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah
2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat optimal
4. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal
5. Pemilu dan Pemilihan Serentak di Tahun 2024

Sedangkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Satpol PP Provinsi Banten adalah:

1. Belum optimalnya aparatur Satpol PP (Jumlah personil, Kompetensi, PPNS, Pemadam Kebakaran)
2. Terbatasnya sumberdaya sarana dan prasarana pendukung (belum memiliki Gedung Perkantoran Satpol PP dan alat pengamanan PHH, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran)
3. Lemahnya koordinasi dengan OPD di Provisi, kab/kota dan instansi vertika terkait
4. Lemahnya koordinasi di Provinsi dengan kab/kota di daerah perbatasan
5. Lemahnya peran dan fungsi Satgas Linmas dan Minimnya Pembinaan Satlinmas
6. Belum optimalnya Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Perda dan Perkada dan Satlinmas
7. Potensi rawan bencana kebakaran berubah atau dinamis

Pemetaan permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.6. Pemetaan Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar MAslah
1	Belum efektifnya Penciptaanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masih kurangnya upaya penegakan Peraturan Perundang undangan	Belum optimalnya aparatur Satpol PP (Jumlah personil, Kompetensi, PPNS)
			Terbatasnya sumberdaya sarana dan prasarana pendukung (belum memiliki Gedung Perkantoran Satpol PP dan alat pengamanan PHH)
			Lemahnya koordinasi dengan OPD di Provinsi, ke/kota dan instansi vertikal terkait
			Lemahnya koordinasi di Provinsi dengan kab/kota di daerah perbatasan
			Lemahnya peran dan fungsi Satgas Lantas dan Minimnya Pembinaan Satlantas
			Belum optimalnya Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Perda dan Perkada dan Satlinmas
2	Belum efektifnya penanggulangi daerah rawan bencana	Belum optimalnya Pelayanan Rencana Kebakaran	Potensi rawan bencana kebakaran berubah atau dinamis
			Minimnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Minimnya Jumlah Personil Pemadam Kebakaran
			Minimnya Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Permasalahan tersebut diatas bila tidak ditanggulangi akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP serta terhadap pencapaian tujuan pembangunan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian Visi Provinsi Banten secara umum.

Tidak bias dipungkiri bahwa kegiatan Pemilu tentunya membutuhkan situasi yang aman dan kondusif, oleh karena itu peran Satpol PP dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak sangatlah strategis agar kegiatan Pemilu dan Pemilihan Serentak bias berjalan dengan lancar.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPD Provinsi Banten. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Provinsi Banten terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Banten sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RPD Provinsi Banten untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pemenuhan penyelenggaraan ketertiban umum,ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Banten, Satuan Polisi Pamong Praja yang masih baru terbentuk berdasarkan Perda Nomor 83 Tahun 2016 membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Banten melalui pendidikan dan pelatihan baik dilaksakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada awal penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu kepada 3 Program, 12 Kegiatan dan 44 Sub dari setiap Kegiatan dengan nilai pagu indikatif Rp. 44.919.569.000, namun seiring dengan berjalannya proses musrenmi dan Verifikasi pada akhirnya dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan pagu indikatif menjadi Rp. 44.919.569.000 dengan adanya perubahan nilai pagu dari setiap Sub Kegiatan disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan dalam rangka pencapaian target kinerja di tahun 2023. Secara rinci Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.7. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	[illegible]					[illegible]				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]				[illegible]				[illegible]	
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Review terhadap rancangan RKPD tidak terlepas dari mengakomodir aspirasi masyarakat baik langsung maupun melalui perwakilan DPRD dan lembaga-lembaga dari Kabupaten/Kota yang terkait dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena untuk suksesnya suatu program dan kegiatan harus didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Sehubungan hal tersebut, pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana kerja akhir ke beberapa usulan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

Selanjutnya program dan kegiatan masyarakat diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satpol PP Provinsi Banten melalui pelaksanaan kegiatan Forum OPD Satpol PP. Usulan-usulan program/kegiatan tersebut di evaluasi berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat dalam masyarakat dengan disinkronkan sesuai tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten, diantaranya isu strategis mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kemudian seluruh usulan program dan kegiatan program tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten untuk menyelaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ada. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

2.8.Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	KABUPATEN SERANG				
	Pengadaan Kendaraan Dalmas	Wil Kab Serang	Operasional Dalmas	1 Unit	
	Pengadaan Kendaraan Patwal	Wil Kab Serang	Operasi Patroli dan Keamanan	1 Unit	

	KOTA SERANG				
	Penyelenggaraan Tipiring	Kota Serang	Penanganan Trantibum	12 kali	
	Razia Pekat	Kota Serang	Penanganan Trantibum	12 kali	
	Penertiban PKL	Kota Serang (Pasar Lama dan Pasar Rawu)	Penanganan Trantibum	12 kali	
	Pengadaan Kapal Patroli Satpol PP	Kota Serang	Penanganan Trantibum	1 Unit	
	Pengadaan Jaket Satpol PP	Kota Serang	Penanganan Trantibum	211 Steel	
	Pengadaan Jaket Damkar	Kota Serang	Penanganan Damkar	76 Steel	
	Pelatihan Pemadam Kebakaran	Kota Serang	Penanganan Damkar	70 Orang	
	KABUPATEN LEBAK				
	Pengadaan Kendaraan Dalmas	Rangkasbitung, Lebak	Penanganan Trantibum	1 Unit	
	Pengadaan Kendaraan Patwal	Rangkasbitung, Lebak	Penanganan Trantibum	1 Unit	
	Penggaklan Penda	Rangkasbitung, Lebak	Operasi Yustisi	60 H	
	KABUPATEN PANDEGLANG				
	pembangunan POSKO penanganan trantibum di 5 zona Hut Pol PP tingkat Kabupaten	Kab. Pandeglang		1 Unit dengan kelengkapannya	
	Jambore Linmas	Kab. Pandeglang		1 Kegiatan	
	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemeliharaan Trantibum	Kab. Pandeglang		1 Unit	
	Pengadaan pakaian dinas (PDH, PDL dan Satgas)	Kab. Pandeglang		200 steel	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Pandeglang		5 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 dalam RPJPN 2005-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah:

"Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dengan memperhatikan Visi ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (PN-1).
b) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN-2).
c) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN-3).
d) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN-4).
e) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN-5).
f) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN-6).
g) Memperkuat stabilitasi politik hokum keamanan dan transformasi pelayanan public (PN-7)

Selanjutnya dalam rangka mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden, sesuai tugas dan fungsinya, dalam Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024 dinyatakan Tujuan dan Sasaran Strategis yaitu :

Tujuan Strategis

1) **Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).**
2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pemerintahan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Sasaran Strategis :

Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan Kementerian Dalam Negeri. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
2) Peningkatan kapasitas partai politik.
3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
5) Penguatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi pancasila.
6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.
8) **Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.**

9) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja selain disusun untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan memperhatikan dan menyelaraskan dengan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisisis strategik dan juga merupakan asemanu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan pembangunan daerah dalam pencapaian Visi Misi RPD Provinsi Banten 2023-2026 pada Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah:

1. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran

Untuk menjabarkan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan sasaran untuk dapat dijadikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran pada Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan 2 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.

Sasaran 1 : Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan merupakan suatu bentuk komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan penyelarasan derap langkah mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Banten di Tahun 2023 - 2026.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Target Capaian Setiap Tahun			
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman Umum pada Provinsi Banten	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	(1,45) Nilai	(1,46) Nilai	(1,48) Nilai	(1,49) Nilai
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kesadaran Penyelenggaraan Peraturan Kebijakan.	Meningkatnya tingkat ketentraman dan ketertiban umum produk pengawasan SPM meningkat/ditaati	Nilai Penegakkan Perda dan Perkada	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas penanganan bencana kebakaran	Nilai Kualitas Penanganan Bencana Kebakaran	100	100	100	100

Tujuan Satuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Untuk mewujudkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provsu TA. 2021 adalah:

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)
2. Inmendagri No. 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
3. Permasalahan dan isu – isu strategis menyangkut situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten untuk tahun 2023 menetapkan 3 program 12 Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
   - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   - 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

2.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

2.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

3.2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Tabel 3.2.
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Pelaksana Kepala Perangkat Daerah
1					2	3	4	5	6
1	10				URUSAN PEMERINTAHAN DAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	10	01			PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT	Persentase Anggaran (%) Untuk Kegiatan pada Program Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Provinsi	100 Persen		0,01 Persen
1	10	01	1	01	Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Persentase Anggaran Program Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum di Provinsi	100 Persen		0,01 Persen
1	10	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen
1	10	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RPJPD	Jumlah Dokumen RPJPD yang Dikoordinasikan dan Disusun	1 Dokumen	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen
1	10	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RPJPD	Jumlah Dokumen Perubahan RPJPD dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perubahan RPJPD	1 Dokumen	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen
1	10	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan RPJP	Jumlah Dokumen RPJP, RPD dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dokumen RPJPD	1 Dokumen	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian Kegiatan/ Kegiatan/ Program/ Bidang/ Sub Bidang/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Perkiraan Pagu Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
X	XX	X1	1.X.1	1.X.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Aparatur Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen
X	XX	X1	1.X.1	1.X.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Aparatur Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan
X	XX	X1	1.X.1	1.X.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Aparatur Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen
X	**XX**	**X1**	1.X.1		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen
X	XX	X1	1.X.1	1.X.1.1	Penatausahaan Gaji dan Kelengkapannya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	61 Orang/ Bulan	4. Meningkatkan Kualitas Aparatur Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	61 Orang/ Bulan
X	XX	X1	1.X.1	1.X.1.2	Penatausahaan Administrasi Kepegawaian Tingkat SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Administrasi Kepegawaian Tingkat SKPD	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Aparatur Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen
X	XX	X1	1.X.1	1.X.1.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyiapan Dokumen Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyiapan Dokumen Keuangan SKPD	12 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Aparatur Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Prioritas Daerah	Prediksi Pagu Anggaran Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
X	20	01	[illegible]		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
X	22	01	[illegible]		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	[illegible]	[illegible]		[illegible]

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Prioritas Daerah	Perkiraan Biaya Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		**[illegible]**	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		**[illegible]**	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Pendanaan Hasil Rencana Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
X	10	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	[illegible]	[illegible]		[illegible]
X	10	02	5.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	[illegible]	[illegible]		[illegible]
X	10	02	5.01	01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum lintas daerah kabupaten dan kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	[illegible]	[illegible]	1. [illegible]	[illegible]
X	10	02	5.01	02	Pelaksanaan Anev Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	[illegible]	[illegible]	1. [illegible]	[illegible]

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Prioritas Daerah	Pendanaan Pagu Rencana Tahun 2023
1					2	3	4	5	6

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Prioritas Daerah	Perkiraan Biaya Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		**[illegible]**	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Prioritas Daerah	Pendanaan Pagu Indikatif Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		**[illegible]**	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			**[illegible]**	[illegible]	[illegible]		[illegible]

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Prioritas Daerah	Perkiraan Biaya Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
X	23	00	0	00	**Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Kebudayaan**	Persentase Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Kebudayaan	100 Persen		0,01 Persen
X	23	08	1	01	Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan (Benda Cagar, Sejarah, Tradisi dan Adat Daerah Setempat)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	1 Dokumen	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen
X	23	08	1	02	Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Tradisi Masyarakat	Jumlah Kelompok Pelaku Nilai Dalam Kearifan Lokal/Adat yang difasilitasi	1 Kelompok	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Kelompok
X	23	08	1	03	Pelestarian Cagarbudaya, Permuseuman, Kesejarahan, dan Pengembangan Tradisi Lokal Kontemporer	Jumlah Cagarbudaya Hasil Pelestarian Kualitas Pengelolaan Cagarbudaya dan Pengembangan Tradisi Lokal Kontemporer	2 Cagarbudaya 1 Tradisi Lokal	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Cagarbudaya 1 Tradisi Lokal
X	23	08	1	04	Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan dalam Upaya Pelestarian Nilai-nilai Budaya, Antar Kelompok dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Pengembangan Kebudayaan dan Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Kegiatan Hasil Kerjasama Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan Nilai Hasil Kebudayaan dalam Pelestarian Pengembangan Kebudayaan dan Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan Nilai Hasil Kebudayaan dalam Pelestarian Pengembangan Kebudayaan	2 Kegiatan 1 Kabupaten	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Kegiatan 1 Kabupaten

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian Kegiatan/ Program/ Subkegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prediksi Pagu Anggaran Tahun 2023
1					2	3	4	5	6

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian Aktifitas Kegiatan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prediksi Pagu Anggaran Tahun 2023
1					2	3	4	5	6

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan, Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Prioritas Daerah	Perkiraan Biaya Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		**[illegible] Penegakan Perundang-undangan, Pembinaan Kebijakan dan Pengelolaan Sumberdaya**	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Banten, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Banten. Sejalan dengan Misi keempat Rencana Pembangunan Derah Provinsi Banten 2023-2026, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 terdiri atas 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp.44.900.000,00. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Hasil Kerja dan Kerangka Pendanaan			Perkiraan Hasil Kerja Setelah Tahun 2023	
						Target (RP)	Rupiah (Rp)	Prioritas Daerah	Target	Rupiah (Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8
1				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			10.000.000.000			10.000.000.000
1	05	01		PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Administrasi dan Sarana Kegiatan yang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi	100 Persen	10.000.000.000		100 Persen	10.000.000.000
1	05	01	1.01	Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Struktur Biaya Pemerintah Daerah	Administrasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	100.000.000		100 Persen	100.000.000
1	05	01	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik dan Benar Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	1 Dokumen	10.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Capaian Hasil Kerja dan Rencana Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun Tahun 2023	
							Tahun 2022	Alokasi Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Alokasi Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Capaian Hasil Kerja dan Rencana Kerja Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun 2023	
							Target 2022	Alokasi 2022	Prioritas Daerah	Target	Alokasi
1					2	3	4	5	6	7	8

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Capaian Hasil Kerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun Lahun 2023	
							Tahun 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Capaian Hasil Kerja dan Rencana Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun 2023	
							Tahun 2022	Alokasi Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Alokasi Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian/ Nama Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Capaian Hasil Kerja dan Rencana Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun Lalu (2022)	
							Tahun 2022	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8
4	23	07	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketersediaan Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	**1.210.021.225**		100 Persen	**800.000.000**
	23	07	1.07	01	Pengadaan Tanah/ atau Bidang Lainnya	Jumlah Luas Pengadaan dan Bidang Lainnya yang Diadakan	10 Unit	1.000.000.000	6 Penunjang Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Lain Lainnya Pemerintahan	11 Unit	500.000.000
5	23	07	1.14		**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketersediaan Terhadap Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	**10.622.996.000**		100 Persen	**11.000.000.000**
	23	07	1.14	04	Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Layanan	10.622.996.000	6 Penunjang Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Lain Lainnya Pemerintahan	1 Layanan	11.000.000.000
6	23	07	1.15		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketersediaan Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	**1.486.800.000**		100 Persen	**1.500.000.000**
	23	07	1.15	07	Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Irigasi dan Jaringan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Irigasi dan Jaringan Lainnya yang Dipelihara dan Dikembangkan Untuk Jalan, Pedestrian	10 Unit	1.486.800.000	6 Penunjang Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Lain Lainnya Pemerintahan	10 Unit	1.500.000.000
	23	07	1.15	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	70.000.000	6 Penunjang Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Lain Lainnya Pemerintahan	100 Unit	80.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian/ Nama Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Capaian Hasil Kerja dan Rencana Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun Lalu (2022)	
							Tahun 2022	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Capaian Hasil Kerja dan Rencana Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun Tahun 2023	
							Tahun 2023	Alur Indikator	Prioritas Daerah	Target	Alur Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8
1	08	01	1.01	02							
1	08	01	1.01	04							
1	08	01	1.01	05							

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Capaian Hasil Kerja dan Rencana Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun Lalu (2022)	
							Tahun 2022	Alur Indikator	Prioritas Daerah	Target	Alur Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian/ Nama Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Hasil Kerja dan Rencana Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2023	
							Tahun 2023	Angka Indikator	Kondisi Kinerja	Target	Angka Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8
1	[redacted]				[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1	[redacted]				[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1	[redacted]				[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Capaian Hasil Kerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun Tahun 2023	
							Target 2022	Alokasi (Rp)	Prioritas Daerah	Target	Alokasi (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Capaian Hasil Kerja dan Rencana Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun Tahun 2023	
							Tahun 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Capaian Hasil Kerja dan Rencana Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun Jalan 2023	
							Tahun 2022	Alokasi Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Alokasi Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Uraian Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Capaian Hasil Kerja dan Rencana Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun Tahun 2023	
							Target 2022	Alokasi Indikatif	Sumber	Target	Alokasi Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8
1	06	06	5.21	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	06	06	5.21	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	06	06	5.21	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Capaian Hasil Kerja dan Rencana Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun Tahun 2023	
							Tahun 2023	Alokasi	Prioritas Daerah	Target	Alokasi
1					2	3	4	5	6	7	8

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan Pembangunan Tahunan Daerah pada umumnya. Renja PD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tahun 2023 ini didasarkan pada visi, misi, sasaran/target dan arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Babten tahun 2005-2025. Dalam Renja Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023 ini juga telah ditetapkan target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun. Untuk itu diharapkan renja ini dapat dijadikan sebagai prioritas dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan terselenggaranya penegakan perda, perkada serta perlindungan masyarakat Provinsi Banten.

Serang, Juni 2022
Kasatpol PP Provinsi Banten

AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.
NIP. 19710805 199101 1001